



LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH



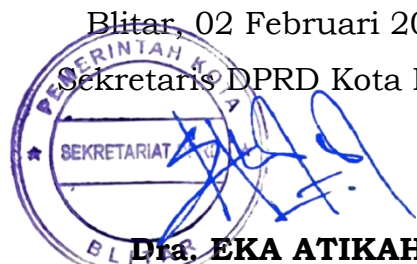
SEKRETARIAT DPRD
KOTA BLITAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Ridhonya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 dapat tersusun sesuai dengan baik. LKjIP disusun sebagai perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mempertanggungjawabkan terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025.

LKjIP juga merupakan salah satu dokumen evaluasi kinerja. Melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program kegiatan yang telah dicapai sehingga dalam perumusan kebijakan ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala dan permasalahan yang ada dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 ini, diharapkan semua pihak yang mendukung dan terkait mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Blitar, 02 Februari 2026
Sekretaris DPRD Kota Blitar

Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD dimana dalam Perwali disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan unsur pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretarian dan keuangan serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Blitar dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pada dasarnya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar bertujuan untuk memberikan fasilitas atau layanan terbaik dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut Sekretariat DPRD Kota Blitar telah menetapkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar, yang merupakan turunan dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, serta acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bagian dari tahapan perencanaan lima tahunan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam upaya peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Blitar guna memberikan kontribusi dalam pencapaian **Visi** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “ **Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat**”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kota Blitar periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.

4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Mengacu pada Misi Pemerintah Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar mengemban amanah dalam pencapaian Misi ke-5 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi".

Untuk mendukung misi ke - 5 Pemerintah Kota Blitar maka Sekretariat DPRD menentukan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yaitu " **Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD**" dengan **sasaran** :

1. Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.
2. Meningkatkan Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah.
3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Sasaran dimaksud telah ditetapkan dalam Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target capaian kinerja (IKM = 81,5/baik)
2. Meningkatkan Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah dengan target capaian kinerja (IKM = 81,5/baik)
3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan target capaian kinerja (Nilai SAKIP : A / 86)

Untuk dapat mencapai sasaran dimaksud pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Hasil perubahan aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodenisasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan 2 (dua) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, 44 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.660.058.943,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) dan realisasi anggaran pada akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 28.425.732.829,00 (*Dua Puluh Delapan*

Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau direalisasikan 89,78%.

Tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2025 dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar sesuai dengan Indikator Kinerja Utama / Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD
Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD
Target : Nilai Indek SKM : 81,5
Realisasi : Nilai Indek SKM : 89,75
Realisasi Anggaran : 6.572.255.124
Tingkat Efisiensi : 1.31

Pada Sasaran 1 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar telah tercapai, terbukti dengan Interpretasi Capaian IKU yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 89,75 atau 110,12 %

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah
Indikator Kinerja : Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah
Target : Nilai Indek SKM : 81,5
Realisasi : Nilai Indek SKM : 89,7
Realisasi Anggaran : 2.419.519.444
Tingkat Efisiensi : 1.28

Pada Sasaran 2 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar telah tercapai, terbukti dengan Interpretasi Capaian IKU yaitu Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 89,7 atau 110 %

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator Kinerja : Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A
Target : Baik (Nilai Sakip : 86)
Realisasi : Baik (Nilai Sakip : 86,13)
Realisasi Anggaran : 19.385.712.261
Tingkat Efisiensi : 1.09

Indikator kinerja sasaran ke 3 (tiga) adalah merupakan hasil penilaian Sakip Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024, diperoleh nilai A (86,13) dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 86,13 atau 100 %.

Gambaran dan analisa hasil capaian survey kepuasan yang disajikan dalam laporan ini, diharapkan merupakan cerminan tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar sehingga hasil survey dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Blitar kepada Anggota DPRD Kota Blitar dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Blitar serta peningkatan kinerja DPRD Kota Blitar sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingannya yang pada gilirannya diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkan DPRD bersama Pemerintah Kota Blitar.

Blitar, 02 Februari 2026
Sekretaris DPRD Kota Blitar

Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

IKHTISAR EKSEKUTIF..... 2

DAFTAR ISI..... 6

BAB I PENDAHULUAN..... 7

A. Latar Belakang..... 7

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... 8

C. Maksud dan Tujuan 11

D. Dasar Hukum 11

E. Aspek-Aspek Strategis 13

F. Isu-Isu Strategis 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15

A. Rencana Strategis 2021-2026 15

B. Perjanjian Kinerja 2025..... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran..... 36

1. Analisa Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025 36

2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022-2024..... 45

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra 47

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM) 48

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)..... 49

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan 52

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran..... 52

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 69

C. Prestasi/Penghargaan 70

BAB IV PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71

B. Langkah Perbaikan 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (Tabel 5.1 dan 6.1)

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2025

C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja berdasarkan tujuan sasaran dan perjanjian yang telah ditetapkan dan permasalahan yang dihadapi setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 memuat informasi tentang capaian kinerja, keberhasilan, kegagalan dan hambatan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, penyusunan LKjIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah :

1. Memberikan informasi capaian kinerja secara terukur kepada Kepala Daerah sebagai pemberi mandat.
2. Sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar.
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan tahunan maupun jangka menengah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, dan pada tahun 2023 diubah lagi dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022, Peraturan Walikota Blitar ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai perwujudan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. TUGAS

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

2. FUNGSI

Adapun fungsi Sekretariat DPRD untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat;
- c. Fasilitasi pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD;
- d. Fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif;
- e. Fasilitasi pelaksanaan Reses Anggota DPRD;
- f. Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang kinerja DPRD;
- g. Fasilitasi pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat dan/atau hearing;

- h. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala baik melalui Sub Domain Website Pemerintah Kota Blitar maupun Website DPRD Kota Blitar;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- s. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Penyusunan RKA dan PRKA Sekretariat DPRD;
- u. Menyampaikan DPA/DPPA Sekretariat DPRD kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah;
- v. Menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah;
- w. Menetapkan PPK Sekretariat DPRD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Sekretariat DPRD; dan
- x. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Sekretariat DPRD;
- b. Perencanaan operasional Sekretariat DPRD;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan hubungan antar lembaga;

Pelaksanaan koordinasi perumusan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas DPRD;

- a. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
- b. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

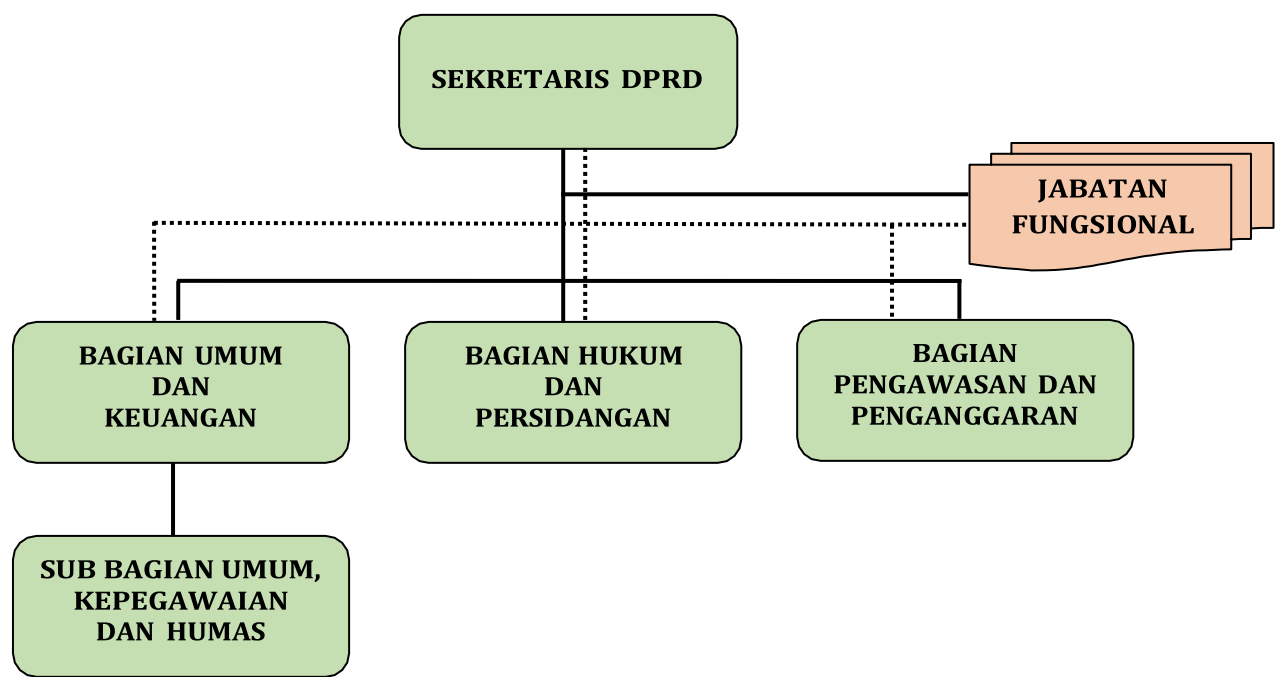
Sedangkan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagaimanaterlihat pada Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Blitar (Gambar 1) dijelaskan sebagai berikut :

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD (membawahi 3 Bagian)
- b. Bagian Umum dan Keuangan membawahi : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas;
- c. Bagian Hukum dan Persidangan
- d. Bagian Pengawasan dan Penganggaran
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar : 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KOTA BLITAR



Berdasarkan : Perwali Kota Blitar No. 56 Tahun 2022
Tanggal : 22 Juni 2022

Dari penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat DPRD Kota Blitar diatas pada intinya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi atau sebagai fasilitator seluruh kegiatan Anggota DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LKjIP) :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek-aspek strategis yang mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar antara lain :

A. Faktor Internal :

1. Struktur Organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - Sekretaris DPRD,
 - Kepala Bagian,
 - Kepala Sub Bagian,
 - Jabatan Fungsional hasil penyetaraan yang terdiri dari : Perencana Ahli Muda, Perisalah Legislasi Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Muda, Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
3. Tersedianya tenaga alih fungsi yang cukup untuk membantu pelaksanaan tugas ASN pada Sekretariat DPRD Kota Blitar.
4. Tersedianya Tata Tertib DPRD Kota Blitar yang dituangkan dalam Peraturan DPRD Kota Blitar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD.
6. Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi berupa tersedianya layanan pendukung tugas dan fungsi DPRD dalam bentuk Aplikasi Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE) : e-RADAR sehingga mempermudah dan mempercepat pencatatan dalam notulensi rapat-rapat DPRD.
7. Peningkatan kualitas Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH)
Kekuatan : Terjalinnnya kerjasama yang baik antara sekretariat DPRD dan anggota DPRD sehingga setiap kegiatan yang di laksanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal maupun agenda.
Kelemahan : Masih perlunya peningkatan kualitas fasilitasi berbasis teknologi yang belum maksimal.

B. Faktor Eksternal :

1. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan masukan sangat penting sebagai bagian dalam perumusan kebijakan, pengawasan kinerja pemerintah daerah dan penyusunan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan daerah;
2. Hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD Kota Blitar, DPRD Kota Blitar dengan Pemerintah Daerah atau OPD terkait/Mitra Kerja.
3. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga dan Tim ahli sebagai Narasumber dalam rangka mendukung peningkatan kinerja DPRD;
4. Dinamika politik yang kondusif, yaitu kondusivitas dinamika hubungan antara KDH dan DPRD serta antar parpol di DPRD mempengaruhi kelancaran tugas Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi dewan

Peluang :

Tahun 2025 merupakan masa jabatan bagi anggota DPRD periode 2024-2029 sehingga hubungan harmonis antara setwan dengan anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat diperlukan untuk memastikan terlaksananya tri fungsi DPRD secara optimal.

Tantangan :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota DPRD masih perlu untuk memahami tri fungsi DPRD utamanya bagi anggota DPRD yang baru periode pertama menjadi anggota DPRD.

F. ISU-ISU STRATEGIS

Sejauh ini tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Tahun 2025 telah memenuhi target yaitu sasaran 1 tercapai dengan nilai indeks kepuasan yaitu 89.75 dari rencana target 81.5, sasaran 2 tercapai dengan nilai indeks kepuasan 89.7 dari rencana target 81.5 dan sasaran 3 dengan hasil nilai indeks kepuasan 91.27 dari rencana target 85,5, artinya capaian target pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 telah sesuai dan melebihi dengan rencana target yang telah ditetapkan.

Adapun Isu – isu strategis yang digunakan sebagai catatan dalam menentukan perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan mengacu pada tujuan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu “ Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD” adalah :

- a. Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator perlu dilakukan peningkatan SDM aparatur dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- b. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD serta peningkatan kapasitas DPRD.
- c. Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mengelola sarana dan prasarana Fasilitasi atau Layanan terhadap kinerja DPRD belum dapat dilaksanakan secara optimal di karenakan belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi.

Dalam menjawab permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025, maka Sekretariat DPRD Kota Blitar mengambil langkah - langkah dalam mendukung upaya pencapaian target kinerja antara lain :

1. Mengawal dan menjaga konsistensi rencana kerja sekretariat DPRD yang telah disinergikan dengan Renja DPRD dan telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan tepat waktu.
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dan meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan peran bagian-bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dengan mengembangkan layanan pendukung tugas dan fungsi DPRD yang berbasis teknologi yang terintegrasi untuk mempercepat proses notulensi rapat – rapat DPRD, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar selama 5 (lima) tahun.

Didalam Visi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 adalah ” **TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT** ”. Dan untuk mewujudkan Visi dimaksud Pemerintah Kota Blitar menetapkan 5 (lima) Misi, yaitu :

- Misi 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3 : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4 : Meningkatkan Infrstruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dari 5 (lima) misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Blitar dalam menunjang keberhasilan pencapaian visi Pemerintah Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unit pendukung melaksanakan misi yang ke 5 yaitu “ Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi ”

Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1.A

Keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD dengan RPJMD

RPJMD TAHUN 2021-2026	RENSTRA TAHUN 2021-2026
VISI	TUJUAN
KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL MAKMUR dan BERMARTABAT	1. Meningkatnya Kualitas Fasilitas Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
MISI 5	SASARAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	1. Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daaerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD 2. Meningkatnya Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Penganggaran Daerah 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
TUJUAN :	INDIKATOR
MENINGKATNYA KUALITAS FASILITASI SEKRETARIAT DPRD BAGI PENINGKATAN KINERJA DPDR	1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD 2. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
SASARAN :	PROGRAM
1. Meningkatnya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD 2. Meningkatnya Fasilitas fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah. 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah.	1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota

Tabel 2.2.A
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Target Kinerja
Tujuan/Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				2020	2023	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD			80	80	80,5	81	81,5	82
		Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80	80	80,5	81	81,5	82
		Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggotaDPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasanDPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80	80	80,5	81	81,5	82
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	A (84)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan bersama antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 53 Tahun 2014.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan Sekretaris DPRD Kota Blitar untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b. Menentukan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mengacu pada Visi Misi Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan Tujuan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 B.1
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	81.5 (nilai)
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	81.5 (nilai)
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	86 (nilai)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.986.542.433,00	APBD/DAU
B.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.673.516.510,00	APBD/DAU
	TOTAL	31.660.058.943,00	APBD/DAU

C. Progres Tindak Lanjut LKJIP
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fasilitasi dalam Pembahasan raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	- Dalam upaya meningkatkan fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD, maka akan disampaikan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas agar terdapat keseragaman administrasi sehingga pada semua kegiatan dapat memenuhi persyaratan administrasi - Dalam melaksanakan kegiatan pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD seluruh pelaksana kegiatan mendasarkan pada SOP yang berlaku - Diperlukannya SOP pada seluruh pelaksanaan kegiatan pembahsan Raperda dan kegiatan peningkatan kapasitas secara lebih detail	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Kegiatan Peningkatan kapasitas	√	√	√
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	- Sebagai upaya meningkatkan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan maka akan dilaksanakan briefing sebelum pelaksanaan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran serta melakukan evaluasi di setiap akhir pelaksanaan, serta pemahaman terkait SOP fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran yang akan	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		dilaksanakan TW 1 sampai TW 4. - Dalam pelaksanaan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran akan dilaksanakan sosialisasi terkait SOP pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran triwulan ke-1 sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2025. Sehingga pada saat fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran tahun 2025 akan terlaksana lebih baik lagi. - Pada fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran akan dibuat standar pelayanan utamanya dalam pelaksanaan fasilitasi reses pada tahun 2025.				
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD guna menunjang tugas dan fungsi DPRD	- Melakukan monitoring berjenjang terhadap capaian kinerja seluruh jajarannya secara optimal - Memberikan pengarahan dan mensosialisasikan hasil pengukuran kinerja untuk dapatnya dipahami oleh seluruh pegawai - Melakukan perbaikan skema crosscutting sehingga dapat terinformasikan hubungan aktivitas antar bidang dan tygas atau fungsi lain yang berkaitan - Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian maupun dalam penyesuaian strategi pencapaian kinerja - Melengkapi bukti dukung tindak lanjut	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		rekomendasi hasil monev capaian kinerja pada aplikasi sakip - Melakukan monitoring berjenjang terhadap capaian kinerja seluruh jajaran secara optimal - Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja berikutnya				
			-			

Tabel 1.2.2
Pagu Anggaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Sekretariat DPRD

NO.	No.Rek	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target	PAGU Murni	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.02.0.00. 0.00.01.00 00	SEKRETARIAT DPRD			33.835.707.743	SEKRETARIAT DPRD			31.660.058.943	(2.175.648.800)
I	4.02.0.00. 0.00.01.00 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	21.942.232.889	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	20.986.542.433	(955.690.456)
1	402.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	10.054.000	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	10.054.000	-
1.1	402.01.2.0 1.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	6.202.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	6.202.800	-
1.2	402.01.2.0 1.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	3.851.200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	3.851.200	-

2	402.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.494.039.781	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.547.895.381	53.855.600
2.3	402.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bulan	3.494.039.781	Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bulan	3.547.895.381	53.855.600
3	402.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100%	391.606.100	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100%	249.715.600	(141.890.500)
3.4	402.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	24 paket	55.584.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	24 paket	21.000.000	(34.584.000)
3.5	402.01.2.05.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	336.022.100	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	228.715.600	(107.306.500)
4	402.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	862.309.100	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	645.678.800	(216.630.300)
4.6	402.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 paket	50.824.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 paket	50.824.500	-
4.7	402.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	53 paket	92.155.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	53 paket	85.067.200	(7.088.300)

4.8	402.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	39 paket	45.015.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	39 paket	54.161.700	9.146.000
4.10	402.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	34.541.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	34.541.000	-
4.11	402.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	48 dokumen	28.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	48 dokumen	20.000.000	(8.800.000)
4.12	402.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	426.983.400	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	238.495.400	(188.488.000)
4.13	402.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	183.989.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	162.589.000	(21.400.000)-
5	402.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	1.761.380.400	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	1.347.273.000	(414.107.400)
5.14	402.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	550.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	550.000.000	-
5.14	402.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 unit	1.172.695.400	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 unit	366.845.900	(805.849.500)
5.14	402.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	64 unit	38.685.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	64 unit	430.427.100	391.742.100

6	402.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	1.270.456.580	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	1.245.064.724	(25.391.858)
6.16	402.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	196.996.080	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	171.604.224	(25.391.856)
6.17	402.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.073.460.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.073.460.500	-
7	402.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	965.988.100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	943.092.100	(22.896.000)
7.17	402.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	29 unit	401.611.100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	29 unit	348.715.100	(52.896.000)
7.18	402.1.02.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	89 unit	182.417.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	89 unit	182.417.000	-
7.19	402.1.02.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	366.960.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	366.960.000	-
7.20	402.1.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76 unit	15.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76 unit	45.000.000	30.000.000

8	402.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	13.186.398.828	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.997.768.828	(188.630.000)
8.21	402.01.2.15.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 orang/bulan	12.721.821.328	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 orang/bulan	12.721.821.328	-
8.22	402.01.2.15.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	14 paket	389.577.500	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	14 paket	200.947.500	(188.630.000)
8.23	402.01.2.15.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	25 orang	75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	25 orang	75.000.000	-
II	402.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	11.893.474.854	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	10.673.516.510	(1.219.958.344)
9	4.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai standar	100%	1.832.838.000	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai standar	100%	2.176.395.400	343.557.400
9.24	4.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	5 dokumen	156.224.200	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	5 dokumen	26.464.200	(129.760.000)
9.25	4.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan perda	10 dokumen	1.385.969.800	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan perda	10 dokumen	1.904.681.200	518.711.400

9.26	4.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang undangan	1 dokumen	120.394.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang undangan	1 dokumen	75.000.000	(45.394.000)
9.27	4.02.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	2 dokumen	138.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	2 dokumen	138.000.000	
9.28	4.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	2 dokumen	32.250.000	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	2 dokumen	32.250.000	-
10	4.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	2.337.898.400	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.043.955.400	(1.293.942.700)
10.29	4.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	450.804.700	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	52.007.700	(398.797.000)
10.30	4.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 dokumen	447.778.300	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 dokumen	80.796.300	(366.982.000)
10.31	4.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	474.576.300	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	553.641.600	79.065.300
10.32	4.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 dokumen	474.361.700	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 dokumen	120.874.700	(353.487.000)
10.33	4.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	490.377.400	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	236.635.400	253.742.000)
11	4.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	571.574.700	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	402.081.200	(169.493.500)

11.34	402.02.2.03 .07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan Penggunaan anggaran	12 dokumen	144.320.500	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan Penggunaan anggaran	12 dokumen	201.346.000	57.025.500
11.34	402.02.2.03 .08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah hasil rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawabana kepala daerah	2 dokumen	427.254.200	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah hasil rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawabana kepala daerah	2 dokumen	200.735.200	(226.519.000)
12	402.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	2.700.970.454	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	2.325.197.454	(375.773.000)
12.35	402.02.2.04 .02	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	1.575.536.654	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	1.350.322.654	(225.214.000)
12.36	402.02.2.04 .08	Sub Kegiatan Publikasidan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hokum, Publikasi dan dokumentasi dewan	5 dokumen	549.606.300	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hokum, Publikasi dan dokumentasi dewan	5 dokumen	535.465.800	(14.140.500)
12.37	402.02.2.04 .04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar/tim ahli	7 orang	163.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar/tim ahli	7 orang	97.200.000	(65.900.000)
12.38	402.02.2.04 .05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	342.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga AhliFraksi	5 orang	282.000.000	60.000.000)
12.39	402.02.2.04 .07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja	1 dokumen	70.727.500	Sub Kegiatan Penyusunan Program KerjaDPRD	Jumlah dokumen rencana kerja	1 dokumen	60.209.000	(10.518.500)
13	402.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persen	1.352.827.400	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persen	1.362.281.900	9.454.500

13.40	402.02.2.05 .03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil reses	75 dokumen	1.352.827.400	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil reses	75 dokumen	1.362.281.900	9.454.500
14	402.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat - rapat DPRD sesuai standar	100%	3.097.365.900	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat - rapat DPRD sesuai standar	100%	3.363.604.856	266.238.956
14.41	402.02.2.08 .01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 dokumen	2.997.365.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 dokumen	3.313.604.856	316.238.956
14.42	402.02.2.08 .02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	2 laporan	100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	2 laporan	50.000.000	(50.000.000)

Tabel 2 B.2
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2025

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja dan anggaran	
		target	pagu
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	Indek kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	81.5	31.660.058.943
SASARAN 1			
Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	81.5	7.865.197.710
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.865.197.710
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	2.176.395.400
Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	26.464.200
Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan perda	10 dokumen	1.904.681.200
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang undangan	1 dokumen	75.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik yang difasilitasi	1 dokumen	138.000.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	2 dokumen	32.250.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	2.325.197.454
Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	1.350.322.654

Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	12 dokumen	535.465.800
Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7 orang	97.200.000
Penyediaan Tim Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	282.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen	60.209.000
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	3.363.604.856
Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 dokumen	3.313.604.856
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	2 laporan	50.000.000
SASARAN 2			
Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	81.5	2.808.318.800
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	2.808.318.800
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.043.955.400
Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 laporan	52.007.700
Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 laporan	80.796.300
Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 laporan	553.641.600
Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 laporan	120.874.700
Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 laporan	236.635.400
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	402.081.200

Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	2 dokumen	200.735.200
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	12 dokumen	201.346.000
Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persen	1.362.281.900
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	75 dokumen	1.362.281.900
SASARAN 3			
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah minimal A	86	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	20.986.542.433
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	10.054.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	6.202.800
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	3.851.200
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.547.895.381
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bulan	3.547.895.381
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100%	249.715.600
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	24 paket	21.000.000
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	228.715.600
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	645.678.800

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 paket	50.824.500
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	53 paket	85.067.200
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	39 paket	54.161.700
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 paket	34.541.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	48 dok	20.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	238.495.400
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	162.589.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	1.347.273.000
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	550.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24 unit	366.845.900
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	64 unit	430.427.100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	1.245.064.724
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	171.604.224
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.073.460.500
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	943.092.100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	348.715.100

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	89 unit	182.417.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	366.960.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76 unit	45.000.000
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.997.768.828
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 org/bulan	12.721.821.328
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	14 paket	200.947.500
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	25 orang	75.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan tujuandan sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar yang tertuang dalam perumusan Rencana Strategis sedangkan Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Blitar.

Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2025, berikut akan diuraikan pengukuran kinerja, akuntabilitas keuangan termasuk penghitungan efisiensi sumber daya sebagai berikut :

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi, sehingga akan terlihat apakah target capaian yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum dapat dilihat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian masih perlu peningkatan pada beberapa target yang telah dicapai tahun 2025. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan sertapencapaian sasaran strategis.

1. Analisa Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025.

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel 2.B.1 LKjIP ini. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada

akhir tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Blitar telah melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.A.1.1

CAPAIAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU/ Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)	Angka	81.5	89,75	110,1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	Angka	81.5	89,7	110	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat

3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil evaluasi Sakip Sekretariat DPRD	Angka	86	86,13	100,1	Nilai Sakip Sekretariat DPRD semakin meningkat
---	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------	----	-------	-------	--

Apabila dijelaskan dengan perhitungan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dapat dilihat pada uraian tabel dibawah ini :

Sasaran 1 : Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.

No	Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)	81,5	89,75	110,1 (sangat berhasil)

Pada tahun 2025 untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja Sasaran 1, Sekretariat DPRD Kota Blitar telah melaksanakan survey kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan target Target Sasaran 1 hasil survey adalah nilai 81,5, sedangkan nilai hasil survey adalah 89.75. Ini menunjukkan bahwa nilai hasil survey telah melebihi target yang ditentukan dengan capaian kinerja adalah 110.1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar untuk Sasaran 1 adalah sangat berhasil di karenakan terdapat beberapa faktor yang menunjang pada sasaran1 yaitu :

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1. Dalam melakukan fasilitasi fungsi pembahasan Raperda dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD tidak dibebani biaya dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapsitas dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan	1. Persyaratan yang telah disampaikan Anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, pada beberapa kegiatan belum memenuhi persyartan administrasi (Belum adanya rekomendasi dari BPSDM, kekeliruan dari Surat undangan kegiatan peningkatan kapasitas), sehingga hal tersebut sering dianggap persyaratan yang terlalu rumit	1. Dalam upaya meningkatkan fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD, maka akan disampaikan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas agar terdapat keseragaman administrasi sehingga pada semua kegiatan dapat memenuhi persyaratan administrasi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
2. Dalam melaksanakan fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan akan tetapi setiap kegiatan dilaksanakan sesuai SOP yang ada	2. Perlunya meningkatkan kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur guna fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD	2. Dalam melaksanakan kegiatan pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD seluruh pelaksana kegiatan mendasarkan pada SOP yang berlaku
3. Terhadap pengaduan, saran dan masukan dalam fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD, selalu bertupaya dilaksanakan dengan cepat.	3. Waktu penyelesaian pembahasan Raperda pada beberapa kasus berbeda-beda karena melibatkan beberapa instansi pengampu.	3. Diperlukannya SOP pada seluruh pelaksanaan kegiatan pembahsan Raperda dan kegiatan peningkatan kapasitas secara lebih detail

Adapun sasaran perhitungan nilai IKM fasilitasi pembahasan raperda dan peningkatan kapasitas DPRD adalah sebagai berikut :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Blitar Nomor 188/23/410.040/DPRD/2024 sebagai berikut:

A. Raperda Kumulatif Terbuka, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029.

B. Raperda di luar Kumulatif Terbuka yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037;

5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045 ; dan
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Bimtek Partai GOLKAR dilaksanakan tanggal 23-25 Januari 2025
- Kegiatan Bimtek Partai PDIP dilaksanakan tanggal 23-26 Januari 2025
- Kegiatan Bimtek Partai PPP dilaksanakan tanggal 13-16 Februari 2025
- Kegiatan Bimtek Partai Demokrat dilaksanakan tanggal 23-26 Februari 2025
- Kegiatan Bimtek Partai Gerindra dilaksanakan tanggal 13-16 Februari 2025
- Kegiatan Bimtek Partai PAN dilaksanakan tanggal 31 Mei – 4 Juni 2025
- Kegiatan Bimtek Partai PKB dilaksanakan tanggal 3-5 Oktober 2025

Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah.

No	Indikator Kinerja Utama /Sasaran Strategis	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
2	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadapfasilitasi fungsipengawasan DPRD dan pembahasan AnggaranDaerah	Rata-rata nilai IKM fasilitasi SekretariatDPRD (IKM fasilitasi Fungsi pengawasanDPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	81,5	89.7	110 (sangat berhasil)

Indikator kinerja utama pada sasaran 2 adalah untuk mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Blitar terhadap fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran dengan jalan melaksanakan SKM terhadap tugas dan fungsi pengawasan serta pembahasan kebijakan anggaran daerah. Pengawasan dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Tinjauan Lapang yang dilakukan Pimpinan dan atau Komisi DPRD pada Mitra Kerja OPD berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Sedang fungsi anggaran dengan melaksanakan pembahasan anggaran daerah.

Pada tahun 2025 untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja Sasaran 2, Sekretariat DPRD Kota Blitar telah melaksanakan survey kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan

target Target Sasaran 2 hasil survey adalah nilai 81,5, sedangkan nilai hasil survey adalah 89.7. Ini menunjukkan bahwa nilai hasil survey telah melebihi target yang ditentukan dengan capaian kinerja adalah 110. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar untuk Sasaran 2 adalah berhasil di karenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian sasaran 2 yaitu :

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak lanjut
1. Dalam melakukan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran anggota DPRD tidak dibebani biaya dan diberikan fasilitas yang sesuai ketentuan	1. Kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan masih perlu untuk ditingkatkan	1. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan maka akan dilaksanakan briefing sebelum pelaksanaan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran serta melakukan evaluasi di setiap akhir pelaksanaan, serta pemahaman terkait SOP fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran yang akan dilaksanakan TW 1 sampai TW 4.
2. Dalam menangani pengaduan petugas pendamping selalu segera menyelesaikan pengaduan saat itu juga sehingga tidak ada aduan yang belum terselesaikan	2. Perlunya meningkatkan kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran.	2.Dalam pelaksanaan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran akan dilaksanakan sosialisasi terkait SOP pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran triwulan ke-1 sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2025. Sehingga pada saat fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran tahun 2025 akan terlaksana lebih baik lagi.
3. Fasilitasi yang telah diberikan kepada anggota DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran telah sesuai dengan ketentuan bahkan pendamping juga diberikan sarana dan prasarana dalam mendampingi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	3. Perlunya adanya standar pelayanan dalam setiap jenis layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.	3.Pada fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran akan dibuat standar pelayanan utamanya dalam pelaksanaan fasilitasi reses pada tahun 2025.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

No	Indikator Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal A	Hasil evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	A (86) baik	A 86,13 baik	baik

Indikator kinerja utama/sasaran strategis dari sasaran 3 diukur dari hasil evaluasi penilaian Sakip Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025. Pada Tahun 2025 menetapkan target nilai Sakip adalah 86 sedang hasil penilaian di atas target dengan realisasi 86,13. Ini menunjukkan bahwa target sasaran 3 tercapai sesuai target dengan nilai A=86,13 (Baik) dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian sasaran ke 3 yaitu :

Faktor Pendukung

- A. Perencanaan Kinerja
 - 1. Telah menyusun dokumen perencanaan yang terdiri atas renstra,renja,RKT,PK dan dokumen perencanaan sehingga telah memenuhi standar yang baik
 - 2. Dokumen renstra telah direviu secara berkala dan menjadi acuan untuk menyusun dokumen rencana kinerja tahunan.
 - 3. Sekretariat DPRD telah menyusun SKP guna mendukung IKU perangkat Daerah
- B. Pengukuran Kinerja
 - 1. Sekretariat DPRD telah menetapkan IKU
 - 2. Memiliki SOP pengumpulan data kinerja
 - 3. Telah melaksanakan monitoring dalam mengukur capaian kinerja yang didukung dengan data kinerja yang relevan
- C. Pelaporan Kinerja
 - 1. Sekretariat DPRD telah menyusun dokumen laporan kinerja sesuai standart
 - 2. Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh capaian kinerja
- D. Evaluasi Internal
 - 1. Telah melakukan evaluasi mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Faktor Penghambat

- A.Perencanaan Kinerja
 - 1. Belum di tindaklanjuti hasil rekomendasi
- B.Pengukuran Kinerja
 - 1.Pengkuruan kinerja telah dilalukan namun hasil pengukuran kinerja belum digunakan dalam penyesuaian strategi dan kebijakan perencanaan.
 - 2. Rencana aksi belum sepenuhnya di laksanakan sehingga belum mengulas permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan di maksud.
- C.Pelaporan Kinerja
 - 1.Belum termuatnya perbandingan realiasi kinerja dengan realisasi kinerja pemerintah daerah kab/kota sekitarnya.
 - 2.Dokumen laporan kinerja belum memuat permasalahan capaian kinerja
- D.Evaluasi Internal
 - 1.Belum optimalnya evaluasi yang menyeluruh guna untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Hasil rekomendasi penerapan Sakip Tahun 2024 yang harus di tindaklanjuti :

1. Melakukan perbaikan skema crosscutting sehingga dapat terinformasikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
2. Melengkapi bukti dukung tindak lanjut rekomendasi hasil monev capaian kinerja pada aplikasi sakip.
3. Melakukan monitoring berjenjang terhadap capaian kinerja seluruh jajarannya secara optimal.
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian (Refocusing) maupun dalam penyesuaian strategi pencapaian kinerja.
5. Memberikan pengarahan dan mensosialisasikan hasil pengukuran kinerja untuk dapatnya dipahami oleh seluruh pegawai.
6. Dalam penyajian data pada dokumen laporan kinerja berikutnya dilengkapi dengan menampilkan informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional.
7. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025 dengan target Renstra dan Realisasi Nasional

Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesekretariatan pada Sekretariat DPRD. Hal tersebut dapat dipahami karena Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dan bukan merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.A.2.1
Realisasi capaian Kinerja Tahun 2023-2025
Sekretariat DPRD Kota Blitar

			2023			2024			2025			
No	Sasaran /IKU	Indikator Kinerja Utama / Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU/Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	80,5	90,25	112,11	81	89,55	110,55	81,5	89,75	110,1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD oleh Sekretariat DPRD meningkat
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	80,5	90	111,80	81	90,2	111,35	81,5	89,7	110	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat

3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85	82,89	96	85,5	86,12	100,72	86	86,13	100,15	Nilai Sakip Sekretariat DPRD semakin meningkat
----	---------------------------------------	------------------------------	----	-------	----	------	-------	--------	----	-------	--------	--

Keterangan :
Realisasi capaian Kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 sebagi berikut :

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 jika di sandingkan sebagi berikut :

No	Sasaran	2024			2025			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	81	89,55	110,55	81,5	89,75	110,1	Realisasi fasilitasi pembentukan perda dan peningkatan kapasitas DPRD telah sesuai dengan target yang direncanakan	
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	81	90,2	111,35	81,5	89,7	110		Perlunya meningkatkan kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran sehingga pada fasilitasi berikutnya dapat berjalan secara optimal
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	85,5	86,12	100,72	86	86,13	100,15	Dalam pelaksanaan laporan capaian kinerja telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan serta telah di pahami oleh seluruh pegawai	

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir Periode Renstra disajikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.A.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 s/d Akhir Periode
Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Thn 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	82	89.75	109.45
Meningkatnya Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	82	89.7	109.39
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86,5 (baik)	86.13	99.57

Keterangan :

Realisasi capaian Kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja akhir periode Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2021-2026, tingkat kemajuan dapat dilihat pada tabel 3.A.3.1 yaitu sebagai berikut :

- Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD, Target kinerja : 82, realisasi pada tahun 2025 : 89,75 tingkat kemajuan perbandingan : 109.45
- Meningkatnya Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah, Target kinerja : 82, realisasi pada tahun 2025 : 89.97 tingkat kemajuan perbandingan : 109.39

- Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, Target kinerja : 86,5, realisasi pada tahun 2023 : 86,13, tingkat kemajuan perbandingan : 99,57

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2025 telah melebihi target yang diharapkan pada akhir tahun Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sedang Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Sekitarnya Tahun 2025

No	Instansi	Nilai IKM	Nilai Interval SKM	Kategori
1.	Sekretariat DPRD Kota Blitar	89.78	88,32 - 100	Sangat Baik
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar	80.92	76,61 – 88,30	Baik

Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2025 memperoleh nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) adalah 89.78. Nilai tersebut apabila dilihat dari Nilai Interval Konversi SKM nilai antara 88,32 – 100 adalah dalam kategori “SANGAT BAIK”. Sedangkan untuk perbandingan instansi sejenis di wilayah sekitar yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar nilai IKM adalah 80,92 dilihat dari Nilai Interval Konversi SKM nilai antara 76,61 – 88,30 adalah dalam kategori “BAIK”. Berdasarkan perbandingan nilai IKM tersebut, Sekretariat DPRD Kota Blitar termasuk kategori lebih baik dibandingkan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Selain pertanggungjawaban kinerja utama, maka perlu kiranya dilihat sejauh mana penganggaran untuk membiayai pencapaian kinerja utama tersebut. dalam melaksanakan fasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2025 melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Permendagri Nomor : 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Hasil perubahan aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodenisasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara rinci Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

Jumlah pagu anggaran Belanja pada Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 secara keseluruhan Rp. **31.660.058.943,00** (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Dari total anggaran tersebut sampai pada akhir bulan Desember 2025 realisasi sebesar Rp. **28.425.732.829,00** (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Sedang secara teknis operasional diuraikan dalam bentuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda.
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik.
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
4. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 6. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

- 5. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 4. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - 5. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 6. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses

B.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui jumlah anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 disajikan data sebagai berikut :

Tabel 3.B.1
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kota Blitar

No	Sasaran	Indikator	Jml Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD.	7.865.197.710	24.84 %
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi fungsi DPRD dalam pengawasan dan anggaran daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	2.808.318.800	9.14 %
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	20.986.542.433	66.02%
JUMLAH			31.660.058.943	100%

B.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Pengukuran pencapaian kinerja keuangan per tujuan dan / atau sasaran yang menjadi kinerja utama (cost per outcome), dihitung dengan cara sebagai berik

**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Blitar
Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2025**

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2025
						K	Rp	K	Rp	K	A			
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD				Angka		31.660.058.943		28.425.732.829		89,78			
			Sasaran Program : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		86	20.986.542.433	86.13	19.385.712.261	100.6	92.37			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	81.5	20.986.542.433	89.78	19.385.712.261	110.15	92.37	Tidak ada permasalahan dalam pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan karena capaiannya sebesar 110,15% dengan realisasi anggaran sebesar 89.78 % yang merupakan efisiensi anggaran	Semua kegiatan maupun sub kegiatan telah dilaksanakan dengan kinerja 100%	Bahwa semua kegiatan maupun sub kegiatan kedepannya tetap di anggaran sesuai dengan rencana kerja DPRD

			Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat Waktu dan sesuai standar	persen	100%	10.054.000	100%	7.152.400	100%	71.13	Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
--	--	--	---	---	--------	------	------------	------	-----------	------	-------	--	--	--

			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7 dokumen	6.202.800	7 dokumen	4.712.400	100%	75.97	Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	laporan	12 laporan	3.851.200	12 laporan	2.440.000	100%	63.35	Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen	100%	3.547.895.381	100%	2.855.520.491	100%	80.49	Dibayarkan sesuai dengan gaji dan tunjangan ASN sejumlah 24 orang,		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	25 orang	3.547.895.381	23 orang	2.855.520.491	100%	80.49	Dibayarkan sesuai dengan gaji dan tunjangan ASN sejumlah 24 orang,		

			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen	100%	249.715.600	100%	235.803.400	100%	94.42		
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	24 paket	21.000.000	24 paket	20.9000.000	100%	99.52	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	25 orang	228.715.600	25 orang	214.903.400	100%	93.97	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen	100%	645.678.800	100 %	620.968.449	100 %	96.17		
			Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12 laporan	238.495.400	12 laporan	231.142.200.	100%	97.00	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan	

			Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	dokumen	48 dokumen	20.000.000	48 dokumen	19.238.400	100%	96.17	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang paket cetakan dan pengadaan yang disediakan	paket	10 paket	34.541.000	10 paket	30.599.680	100%	88.60	direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	22 paket	50.824.500	22 paket	49.787.410	100%	97.95	direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	39 paket	54.161.700	39 paket	51.594.713	100%	92.26	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan,		
			Sub Kegiatan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12 laporan	162.589.000	12 laporan	158.136.835	100%	97.26	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan,		

			Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	45 paket	85.067.200	45 paket	80.469.211	100%	94.60	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	persen	100%	1.347.273.000	100 %	1.307.701.450	100 %	97.06			
			Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	3 unit	550.000.000	3 unit	543.839.500	100 %	98.87	direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	14 unit	366.845.900	14 unit	353.972.250	100 %	96.49	direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	64 unit	430.427.100	64 unit	409.889.700	100%	95.22	direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai standar	persen	100%	1.245.064.724	100 %	1.194.797.368	100 %	95.96			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12 laporan	171.604.224	12 laporan	154.829.067	100%	90	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12 laporan	1.073.460.500	12 laporan	1.039.968.301	100%	97	direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	persen	100 %	943.092.100	100 %	846.353.903	100 %	90			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	89 unit	182.417.000	89 unit	171.899.100	100%	94	direalisasi sesuai dengan jumlah tagihan riil biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kantor		

			Sub kegiatan pemeliharaan/r ehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	unit	13 unit	366.960.000	13 unit	346.319.305	100%	94.37	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan jumlah kontrak dan kebutuhan biaya pemeliharaan gedung kantor		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,bi aya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau bayarkan pajak dan perijinannya	unit	29 unit	348.715.100	29 unit	283.554.248	100%	81.31	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan jumlah tagihan riil biaya pemeliharaan kendaraan operasional dinas		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/re habilitasi	unit	76 unit	45.000.000	76 unit	44.581.250	100 %	99.07	direalisasi sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		
			Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100 %	12.997.768.828	100%	12.317.414.800	100%	94.76			

			Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	orang	25	12.721.821.328	25	12.092.226.800	100%	95.05	Dibayarkan sesuai dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD sejumlah 25 orang,		
			Sub Kegiatan pelaksanaan medical cek up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical cek up DPRD	orang	25 orang	75.000.000	22 orang	31.438.000	100 %	41.92	dibayarkan sesuai dengan tagihan biaya Medical Check Up anggota DPRD		
			Sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	paket	10 paket	200.947.500	10 paket	193.750.000	100%	96.42	Efisiensi anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD		
			Sasaran Program : Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan raperda serta peningkatan kapasitas DPRD		81.5	7.865.197.710	89,75	6.572.255.124	110.1	83.86			
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan	persen	100%	7.865.197.710	100%	6.572.255.124	100%	84.70	Dalam pencapaian target kinerja program, semua kegiatan fasilitasi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan	Semua program,kegiatan sub kegiatan, telah dilaksanakan dengan kinerja 100 %, untuk anggaran yang tersisa merupakan penyediaan untuk fasilitasi DPRD	Ke depan anggaran akan tetap disediakan sesuai dengan rencana kerja DPRD

				Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD								Peningkatan Kapasitas DPRD telah dilaksanakan seluruhnya walaupun ada sisa 15.3 % yang sifatnya merupakan penyediaan fasilitas untuk anggota DPRD		
			Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	persen	100%	2.176.395.400	100%	1.617.810.733	100%	74.33			
			Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan/ke terangan naskah akademik yang difasilitasi	dokumen	1 dokumen	138.000.000	1 dokumen	135.554.600	100 %	98.23			
			Sub Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	dokumen	10 dokumen	1.904.681.200	10 dokumen	1.354.608.633	100%	71.12			

			Sub Kegiatan Penyelenggaraa n kajian perundang - undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	dokumen	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	72.400.000	100%	96.53			
			Sub Kegiatan penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	dokumen	2 dokumen	32.250.000	2 dokumen	30.855.000	100%	95.67			
			Sub kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	dokumen	5 dokumen	26.464.200	5 dokumen	24.392.500	100%	92.17			
			Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	persen	100%	2.325.197.454	100 %	1.740.791.783	100 %	74.87			
			Sub Kegiatan Pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	dokumen	6 dokumen	1.350.322.654	6 dokumen	828.480.283	100%	61.35			

			Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	persen	100%	3.363.604.856	100%	3.261.826.608	100%	96.97			
			Sub Kegiatan kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	dokumen	12 dokumen	3.313.604.856	12 dokumen	3.213.652.608	100 %	96.98			
			Sub Kegiatan Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	laporan	2 laporan	50.000.000	2 dokumen	48.174.000	100%	96.35			
			Sasaran Program : Meningkatkan fasilitasi fungsi DPRD dalam fungsi pengawasan dan anggaran daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah		81.5	2.808.318.800	89.7	2.419.591.444	110.6	86.16			

				Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	persen	100 %	2.808.318.800	100%	2.419.591.444	100%	86.16	Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam penganggaran dan pengawasan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara kinerja telah tercapai 100 % sedangkan untuk anggaran masih ada sisa 13,84 % yang sifatnya merupakan penyediaan fasilitas untuk anggota DPRD	Semua program,kegiatan sub kegiatan, telah dilaksanakan dengan kinerja 100 %, untuk anggaran yang tersisa merupakan penyediaan untuk fasilitasi DPRD	Ke depan anggaran akan tetap disediakan sesuai dengan rencana kerja DPRD
			Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase fasilitasi pembahasan anggaran sesuai standar	persen	100%	1.043.955.700	100 %	945.232.274	100 %	90.54			
			Sub kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	dokumen	2 dokumen	533.641.600	2 dokumen	466.307.964	100%	84.23			

			Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	dokumen	2 dokumen	120.874.700	2 dokumen	116.790.240	100%	96.62			
			Sub Kegiatan pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2 dokumen	52.007.700	2 dokumen	50.372.700	100 %	96.86			
			Sub Kegiatan pembahasan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil perubahan pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2 laporan	80.796.300	2 dokumen	79.378.410	100%	98.25			
			Sub Kegiatan pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	dokumen	2 dokumen	236.635.400	2 dokumen	232.382.960	100%	98.20			
			Kegiatan Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan	Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD sesuai standar	persen	100%	402.081.200	104%	352.451.520	104%	87.66			

			Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	dokumen	12 dokumen	201.346.000	12 dokumen	166.750.000	100%	82.82			
			Sub Kegiatan pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah	dokumen	2 dokumen	200.735.200	2 dokumen	185.701.520	100%	92.51			
			Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persen	100%	1.362.281.900	100%	1.121.907.650	100%	82.36			
			Sub Kegiatan pelaksanaan reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	dokumen	75 dokumen	1.362.281.900	75 dokumen	1.121.907.650	100%	82.36			

Dari aspek keuangan, kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam rangka memfasilitasi Anggota DPRD Kota Blitar dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat dikategorikan **berhasil**. Hal ini dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 31.660.058.943,- dengan realisasi Rp. 28.425.732.829 atau 89.78 % dan dari aspek capaian kinerja dengan nilai IKM dengan target 81.5, dan realisasi hasil IKM tahun 2025 sebesar 89.78.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.B.3.1
Persentase Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kota blitar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2025		Persentase (%)	Tahun 2025				Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi		Anggaran	Penyerapan Anggaran	Persentase (%)	Sisa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD.	81.5	89.75	110.12	7.865.197.710	6.572.255.124	83.56	1.292.942.586	1,31
Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	81.5	89.7	110.06	2.808.318.800	2.419.591.444	86.16	388.727.356	1,28
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah .	86	86.13	100.15	20.986.542.433	19.385.712.261	92.37	1.600.830.172	1,09

Formulasi Tingkat Efisiensi : % Kinerja : % Penyerapan Anggaran

Faktor Pendukung dari presentase tingkat efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 yaitu : Seluruh pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Prestasi maupun penghargaan yang diterima sekretariat DPRD pada Tahun 2025 adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP) dengan perolehan nilai **86.13**



SEKRETARIAT DPRD				
NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	TOTAL NILAI
A	PERENCANAAN KINERJA	30%	27.23	86.13
B	PENGUKURAN KINERJA	30%	23.31	
C	PELAPORAN KINERJA	15%	14.34	
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25%	21.25	

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 wujud pertanggung jawaban tertulis penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretariat DPRD Kota Blitar memuat keberhasilan, kegagalan, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2025 dan merupakan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari seluruh data yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan masuk dalam kategori berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Blitar adalah fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD menetapkan 1 tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretaris DPRD dengan Walikota Blitar atas Nama Pemerintah Daerah Kota Blitar yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD. Capaian kinerja pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam dukungan Fungsi Pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD tercapai 100% dengan nilai indeks kepuasan Anggota DPRD : 89.75 sedang target indeks kepuasan anggota DPRD adalah 81.5 sehingga masuk dalam kategori berhasil dan baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah.

Capaian kinerja pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan dan penganggaran daerah tercapai 100% dengan nilai indeks kepuasan Anggota DPRD : 89.7 sedang target indeks kepuasan Anggota DPRD adalah 81.5 sehingga masuk dalam kategori berhasil dan baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan target nilai 86, pada Tahun 2025 nilai Sakip Sekretariat DPRD adalah 86,13.

Sejalan dengan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, capaian realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 termasuk dalam katagori berhasil dengan tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar 89.78 %.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dari evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap capaian kinerja sasaran dalam penyelenggaraan program, kegiatan, Sub Kegiatan dan kebijakan selama Tahun Anggaran 2025 maka disampaikan saran perbaikan sebagai solusi permasalahan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong seluruh Alat Kelengkapan DPRD Kota Blitar untuk Menyusun Rencana Kerja DPRD sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD dan konsisten dalam pelaksanaannya.
- b. Menciptakan inovasi baru yang terintegrasi database untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam fasilitasi kinerja DPRD.
- c. Selalu meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antara Sekretariat DPRD dengan DPRD dan Instansi terkait sebagai Mitra Kerja.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Anggota DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.

- e. Menjalin dan meningkatkan komunikasi internal yang baik dengan Anggota DPRD Kota Blitar sehingga tercipta hubungan harmonis antara DPRD dengan Sekretariat DPRD guna mengatasi masalah yang sering muncul dalam penetapan kebijakan internal dan juga menjalin komunikasi eksternal yang baik pula antara Sekretariat DPRD dengan Instansi terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat memberikan informasi dan menggambarkan tingkat capaian kinerja dari seluruh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Blitar.

Blitar, 2 Februari 2026
Sekretaris DPRD Kota Blitar



Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. EKA ATIKAH**
Jabatan : **Sekretaris DPRD**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025

Sekretaris DPRD
Kota Blitar
Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808121988032006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	81.50()
2	Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	81.50()
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86.00()

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10,673,516,510.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,986,542,433.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
Total:		31,660,058,943.00	



Walikota Blitar,

SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.



Blitar, 26 Oktober 2025

Sekretaris DPRD

Kota Blitar,

Dra. EKA ATIRAH

Pengusaha Utama Muda (IV/c)

NIP. 196808121988032009

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu	Realisasi	%	Ket
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)	81.5	89.75	110.12	tercapai	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	7.865.197.710	6.572.255.124	83.56	tercapai
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	81.5	89.7	110.06	tercapai		2.808.318.800	2.419.591.444	86.16	tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu	Realisasi	%	Ket
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Sakip Sekretariat DPRD	86	86.13	100.15	tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	20.986.542.433	19.385.712.261	92.37	tercapai


Sekretaris DPRD
Kota Blitar
Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP.19680812 198803 2 006

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

Visi : **Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat**

Misi V : ***“Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”***

Tujuan					Sasaran					Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal	Target	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Strategi	Arah Kebijakan
			2020	2025				2020	2025		
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	rata – rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD, IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80	81.5	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)	80	81.5	Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD dalam fungsinya sebagai Pembentuk Peraturan Daerah dan meningkatkan kapasitas DPRD	Optimalisasi Fasilitasi bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD dalam fungsi pembentuk Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan menetapkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dituangkan dalam kegiatan : 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Peningkatan Kapasitas DPRD 3. Fasilitasi Tugas DPRD

Tujuan					Sasaran					Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal	Target	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Strategi	Arah Kebijakan
			2020	2025				2020	2025		
										Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Blitar	Peningkatan kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Blitar melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme ASN.
					Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80	81.5	Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran daerah	Optimalisasi Fasilitasi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran daerah dengan menetapkan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dituangkan dalam kegiatan : 1. Pembahasan Kebijakan Anggaran 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. 3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	86	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	86		


 Sekretaris DPRD
 Kota Blitar
Dra. EKA ATIKAH
 Pembina Utama Muda
 NIP.19680812 198803 2 006

**Rencana Kerja Tahunan 2025 Perubahan
Sekretariat DPRD**

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	81.5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.865.197.710	Bagian Hukum dan Persidangan
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	2.176.395.400	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	26.464.200	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	1.904.681.200	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1 dokumen	75.000.000	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	1 dokumen	138.000.000	
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2 dokumen	32.250.000	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	2.325.197.454	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
							Bagian Hukum dan Persidangan
			pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dok	1.350.322.654	
			Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7 TA	97.200.000	
			Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	5 org	282.000.000	
			Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dok	60.209.000	
			Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	12 dok	535.465.800	
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	3.363.604.856	
			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 dok	3.313.604.856	
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	2 lap	50.000.000	
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	81.5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	2.808.318.800	Bagian Pengawasan dan Penganggaran

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.043.955.700	Bagian Pengawasan dan Penganggaran
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 lap	52.007.700	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 lap	80.796.300	
			Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 lap	553.641.600	
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 lap	120.874.700	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 lap	236.635.400	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	402.081.200	
			Sub Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 dok	201.346.000	
			Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	2 dok	200.735.200	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	1.362.281.900	
			Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75 dokumen	1.362.281.900	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	20.986.542.433	Bagian Umum dan Keuangan
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	10.054.000	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dok	6.202.800	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12 lap	3.851.200	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.547.895.381	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org	3.547.895.381	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	249.715.600	
			Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	24 paket	21.000.000	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 org	228.715.600	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	645.678.800	Bagian Umum dan Keuangan
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22 paket	50.824.500	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	45 paket	85.067.200	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39 paket	54.161.700	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	34.541.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	48 dok	20.000.000	
			Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 lap	238.495.400	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	162.589.000	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	1.347.273.000	
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit	550.000.000	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 unit	430.427.100	Bagian Umum dan Keuangan
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14 unit	366.845.900	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	1.245.064.724	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	171.604.224	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	1.073.460.500	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	943.092.100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	348.715.100	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89 unit	182.417.000	Bagian Umum dan Keuangan
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	366.960.000	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76 unit	45.000.000	
			Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.997.768.828	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 org	12.721.821.328	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	10 paket	200.947.500	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	25 orang	75.000.000	


 Sekretaris DPRD
 Kota Blitar
Dra. EKA ATIKAH
 Pembina Utama Muda
 NIP.19680812 198803 2 006

